

MUTU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Zulfakar

Prodi Administrasi Pendidikan, FIP IKIP Mataram

Email: zulfakar07@gmail.com

Abstract: Management is a theory that is used as a foundation to carry out all organizational activities which have been jointly determined, in order to achieve togetherness of vision and mission in institutions, of educational institutions in particular, both in the domain of national and institutional objectives. Improving the quality of education becomes a very urgent problem, related to customers, from direct education users "learners" of society in general, to continue to improve develop all potential which is institutionally, will be facilitated by educational institutions, in the concept of decentralization of education in the management, implementation, development, and policy determinants in a structured manner, starting from the central government, provincial government, regional / city government, educational institutions to the class or teacher who directly become the main executor in the process of educational journey series.

Keywords: *quality, Islamic education institution*

LATAR BELAKANG

Lembaga pendidikan Islam, terutama pondok pesantren, dalam sejarah perjuangan Indonesia memiliki posisi yang unik karena sikap perlawanannya terhadap penjajahan. Perlawanan ini antara lain diwujudkan dengan sikap menolak kebijakan politik penjajah Belanda di bidang pendidikan. Penolakan ini mewujud dalam bentuk anti-kerjasama atau non-kooperatif yang terlihat dari bagaimana pondok pesantren mengembangkan pendidikannya. Pengelola pondok pesantren biasanya sengaja menjauh dari pusat kekuasaan sebagai wujud penolakan intervensi sekaligus perlawanan. Sikap perlawanan lembaga pendidikan Islam terhadap politik penjajah ini di satu sisi memang merupakan bukti komitmen kebangsaan yang mengakar kuat dalam diri umat Islam Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat implikasi berupa ketertinggalan pada sejumlah capaian

terutama pada bidang ilmu-ilmu modern yang ternyata juga dibutuhkan oleh umat Islam. Adanya kondisi semacam ini beserta munculnya sejumlah pemikiran mengenai pembaruan Islam kemudian memunculkan madrasah sebagai sebuah kompromi ideologis antara lembaga pendidikan Islam yang ingin mempertahankan tradisi namun juga tidak ingin tertinggal terlalu jauh (Supani, 2009).

Selepas masa penjajahan, madrasah kemudian berkembang dengan dukungan pemerintah. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional misalnya menunjukkan bagaimana madrasah menjadi bagian integral pendidikan nasional Indonesia. Undang-Undang ini memberi amanat bagi madrasah untuk melakukan transformasi sehingga berubah dari lembaga pendidikan agama menjadi sekolah yang berciri agama Islam. Hal ini tentunya memperkuat status madrasah sebagai bagian

dari sistem pendidikan nasional dan bukan lagi sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah sebagaimana terjadi di masa lalu (Supani, 2009 & Supaat, 2011). Amanat Undang-Undang untuk transformasi dalam diri madrasah merupakan salah satu tantangan mengingat beragam persoalan yang biasa dihadapi semisal (1) kapasitas manajemen, (2) kurikulum, (3) keterbatasan SDM, (4) orientasi akademik, (5) ujian nasional, (6) otonomi daerah (Supaat, 2011). Transformasi juga tidak dapat dilakukan dengan serentak mengingat karakter masing-masing wilayah di Indonesia dan juga pandangan yang beragam membuat bentuk madrasah itu sendiri tidaklah sama atau identik. Dalam konteks madrasah aliyah misalnya, selain madrasah aliyah seperti umumnya dikenal, juga terdapat madrasah plus yang mengizinkan siswanya untuk memperdalam pengetahuan, juga terdapat madrasah yang terintegrasi dengan pondok pesantren yang karakternya dapat dibedakan antara yang tradisional (*salaf*) dan modern (*khalaf*). Setelah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, madrasah kini harus bersaing dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang biasanya lebih dahulu mapan. Dalam konteks madrasah, tantangan bahkan lebih kompleks karena adanya tuntutan pengembangan nilai-nilai keislaman dalam diri siswa sebagai subjek pendidikan. Karenanya, sejumlah madrasah kemudian mencoba melakukan inovasi dengan mengadopsi sejumlah model dalam meningkatkan kualitas madrasah. Sebagai ilustrasi, untuk konteks madrasah aliyah, Supaat (2011) menyebut ada tiga model yang sering diaplikasikan yaitu model institusional, model sains terintegrasi, dan model manajemen terpadu. Penerapan

ketiga model ini tentunya sangat bergantung pada karakter madrasah.

KAJIAN LITERATUR

IMPLEMENTASI MUTU

Daya saing secara internasional adalah merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Pada akhir bulan September yang lalu, World Economic Forum (WEF) melansir sebuah laporan tentang tingkat daya saing negara-negara di dunia (*Global Competitiveness Index*) untuk tahun 2017-2018. Ratusan negara di dunia dinilai dan teliti, seberapa berkualitas dan mampu bersaing setiap negara. Indonesia termasuk dalam daftar kajian tersebut dan kabar baiknya di tahun ini, Merah Putih mengalami peningkatan peringkat. *Global Competitiveness Index* (GCI) merupakan laporan tahunan yang telah disusun oleh *Executive Chairman* WEF, Profesor Klaus Schwab sejak tahun 1979. Metode tersebut kemudian dikembangkan di tahun 2005 oleh Xavier Salai Martin dan sejak saat itu metode dan berbagai hasil laporan GCI ditemukan dan diumumkan.

WEF dalam laporan tahun 2017-2018 ini, mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan 12 pilar untuk mengukur daya saing yang menjadi penentu dari pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 12 pilar tersebut diantaranya adalah Insitusi, Infrastruktur, Lingkungan Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Primer, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Peterampilan, Efisiensi pasar barang, Efisiensi pasar tenaga kerja, Pengembangan pasar Finansial, Kesiapan Teknologi, Besaran pasar, Kepuasan berbisnis dan Inovasi. Dalam lansiran WEF (26/09/2018), sebanyak 137 negara masuk dalam daftar

GCI tahun ini dan Indonesia bertengger di peringkat 36. Peringkat ini merupakan peningkatan dari peringkat tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia diposisi 41. Hebatnya, posisi Indonesia tersebut secara ekonomi dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang selama ini telah dikenal sebagai negara maju seperti Brazil (peringkat 80), Rusia (peringkat 38), Italia (peringkat 43) ataupun Turki (peringkat 53). WEF menilai bahwa Indonesia telah berhasil untuk meningkatkan performanya dalam berbagai pilar walaupun peringkat ini diraih didapat dari keunggulan besaran pasar yang berada di peringkat 9 dunia, dan kekuatan makroekonomi yang menempati peringkat 26 dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga dinilai sebagai negara yang berada di peringkat atas dalam hal inovasi di negara-negara berkembang. Namun sayangnya, Indonesia masih terbilang buruk dalam kesiapan teknologi dan efisiensi pasar tenaga, WEF menempatkan Indonesia dalam peringkat 80 dan 96 dunia. Meski Indonesia dinilai kompetitif dibanding negara-negara tersebut, Indonesia masih harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang beberapa telah berada di peringkat atas. Seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 23) dan juga Thailand (peringkat 32). Melihat peringkat ini, sehingga otomatis di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat dari 10 negara anggota ASEAN.

Salah satu alasan mengapa sebuah negara gagal bersaing adalah lemahnya budaya mutu dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Lemahnya budaya mutu di negara berkembang menurut Madu (1998) berdampak pada rantai reaksi yang berujung pada rendahnya kualitas hidup. Tiadanya budaya mutu dalam sebuah masyarakat akan

berdampak secara langsung pada kualitas lingkungan kerja yang rendah. Karena berada dalam lingkungan kerja dengan kualitas rendah tersebut, maka produktivitas yang dihasilkan pun menjadi rendah. Produktivitas bangsa secara nasional dibangun oleh unsur-unsur usaha dan industri yang ada sehingga ketika produktivitas di dunia usaha rendah, maka produktivitas secara nasional juga rendah. Bangsa dengan produktivitas rendah sudah hampir pasti akan mengalami keterbatasan dalam bersaing di tingkat global. Negara yang kurang kompetitif di tingkat global akan kesulitan bersaing mendapatkan investasi asing dan juga kepercayaan dunia internasional. Jika hal tersebut terjadi, maka dunia usaha akan sulit berkembang akibat tingginya tingkat kegagalan bisnis. Karena banyak usaha dan bisnis yang gagal berkembang, maka wajar jika negara berkembang mengalami fenomena pengangguran yang tinggi sehingga pada akhirnya kualitas hidup masyarakatnya rendah.

Gambaran mengenai rendahnya kualitas hidup bangsa Indonesia juga terlihat dalam capaian di dunia pendidikan. Berdasarkan data OECD (06/12/2016) dalam *Programme for International Student Assessment* atau PISA, capaian pelajar Indonesia dalam matematika berada di papan bawah, di atas Brasil, Peru, Lebanon, Tunisia, Kosovo, Aljazair, dan Republik Dominika. Keterangan yang dikeluarkan OECD dan PISA menyebutkan bahwa sejak ambil bagian dalam survei tahun 2000, Indonesia telah mengalami kemajuan 'yang sangat luar biasa'. "Pada periode 2012-2015, hasil tes untuk sains di kalangan siswa usia 15 tahun naik 21 poin. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat." Jika laju ini

dipertahankan, kemampuan siswa-siswa di Indonesia di bidang sains akan menyamai kemampuan siswa-siswa di negara-negara maju pada 2030.

Sejumlah penilaian di atas memang tidak mampu mencakup seluruh aspek dalam dimensi pendidikan di Indonesia, terutama pada lembaga pendidikan Islam. Bagaimana pemahaman dan praktek ibadah siswa yang dinilai sangat penting dalam membentuk pribadi muslim misalnya, tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan capaian matematika atau ilmu alam. Sopan santun seorang siswa sebagai murid kepada gurunya ataupun sebagai anak kepada orang tuanya juga merupakan sebuah capaian yang wajar dalam proses pendidikan Islam di Indonesia, namun kurang mendapat poin dalam konteks negara maju. Meskipun demikian, penilaian di atas dan yang sejenis dengannya dapat diacu sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Atas dasar itu wajar jika muncul sejumlah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama dengan meminjam konsep yang telah matang atau sukses diterapkan, terutama di dunia bisnis. Fenomena ini bahkan juga terjadi di sejumlah negara maju. Peck & Reitzug (2012) menyebutkan setidaknya tiga model bisnis yang banyak digunakan dalam mengelola pendidikan, yaitu *Management by Objectives*, *Total Quality Management*, dan *Turnaround*. *Management by Objectives* seringkali dikaitkan dengan pemikiran Peter Drucker yang sangat berpengaruh di dunia bisnis untuk perencanaan perusahaan yang rasional dengan penentuan capaian dan tujuan kinerja sebagai intinya.

Manajemen mutu terpadu seringkali dinisbatkan pada hasil pemikiran W. E. Deming, meskipun secara konseptual, yang menekankan pentingnya fokus pada

konsumen, peningkatan yang berkelanjutan, dan kewajiban manajerial untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang efektif yang akan memaksimalkan kinerja karyawan. *Turn around* sebagai model siklus manajemen dalam perusahaan juga muncul sebagai salah satu model pengelolaan pendidikan, terutama dikaitkan dalam upaya meningkatkan kualitas ketika menghadapi tantangan bisnis yang meningkat (Peck & Reitzug, 2012). Menurut Akhyar (2014), ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented* Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* yang diperkenalkan oleh teori *education production function* (Hanushek, 1979) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Dengan demikian manajemen mutu terpadu merupakan langkah yang perlu dijalankan dalam sebuah lembaga pendidikan saat ini.

Dengan demikian, pengembangan mutu lembaga pendidikan Islam dengan meminjam konsep manajemen mutu terpadu

harus dilihat sebagai salah satu dari beragam strategis yang mungkin digunakan. Hal ini penting untuk ditandaskan agar manajemen mutu terpadu menjadi bagian dari budaya mutu yang bertujuan meningkatkan kualitas dan bukan tujuan dari mutu itu sendiri. Jika tidak demikian, dikhawatirkan manajemen mutu terpadu akan menjadi dogma baru dalam pendidikan yang tentunya akan merugikan. Dunia pendidikan sebagaimana dunia bisnis dan industri akan selalu mengalami perubahan sehingga transisi dari satu model ke model yang lain akan terus terjadi. Dengan memposisikan manajemen mutu terpadu sebagai budaya mutu, maka pengelola pendidikan akan siap dengan pengembangan lembaga yang dipimpinnya menjadi lebih baik seiring tuntutan. Manajemen mutu terpadu bisa jadi akan digantikan model lain seperti Learning Organisation sebagaimana dianjurkan dalam kajian Ferguson-Amores, Garcia-Rodriguez, & Ruiz-Navarro (2005) ataupun model Lean yang kini banyak dikaji (Zak & Waddell, 2010; Trudell, 2013; & Goldberg & Weiss, 2014).

PENTINGNYA MUTU DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Sebagai konsep yang absolute, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, kecantikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut disebut dengan sempurna dan tidak menghemat biaya. Sebagai konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, "kalau belum rusak janganlah diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan bukan merupakan konsep yang

sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, "bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila anda tidak melakukan orang lain pasti melakukannya. Ada tiga pilar kemampuan dasar yang diperhatikan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, yang kesemuanya itu dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya memenuhi standar nasional tetapi juga perlu memenuhi standar internasional. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus menerus pada hasil atau proses disebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Oleh karena itu, Untuk melakukan bagaimana kualitas mutu pendidikan yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal dari hasil pembelajaran, maka secara sederhana kita harus juga memperhatikan dan memerlukan tentang manajemen perencanaan mutu dan kebijakan mutu dalam suatu lembaga pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.

Manajemen mutu terpadu merupakan suatu pola manajemen yang berisi prosedur agar setiap orang dalam organisasi berusaha keras secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses. Dalam dunia pendidikan, manajemen mutu terpadu merupakan filosofi pengembangan berkelanjutan, yang dapat memberikan jalan bagi setiap institusi untuk memenuhi dan melebihi berbagai kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggan di masa kini dan masa depan. Sekolah efektif merupakan produk dari penerapan manajemen mutu

terpadu pendidikan, yang memandang sekolah bukan sesuatu yang bersifat parsial, tetapi sekolah sebagai sebuah sistem (Yetri, 2012).

Manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan sebagaimana dijelaskan juga oleh Maryamah (2013) tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas, daya saing bagi output (lulusan) dengan indikator adanya kompetensi baik intelektual maupun ketrampilan serta kompetensi sosial siswa/lulusan yang tinggi. Dalam pencapaian hasil tersebut, implementasi manajemen mutu terpadu di dalam organisasi pendidikan perlu dilakukan dengan sebenarnya tidak dengan setengah hati. Penerapan manajemen mutu terpadu sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat berhasil secara instant, artinya perubahan inovatif yang diharapkan tidak dapat terwujud secara langsung, karenanya diperlukan berkesinambungan agar dapat terwujudkan produktifitas yang tinggi. Selain itu diperlukan juga kebersamaan dan kerjasama seluruh komponen penyelenggara suatu lembaga pendidikan, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

METODELOGI PENELITIAN

Penerapan manajemen mutu terpadu di sejumlah lembaga pendidikan, diantaranya penelitian Raharjo (2006) terkait pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi di SMK Mikael Surakarta yang dilakukan melalui empat hal. **Pertama**, pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan berbasis produksi dan penerapan manajemen mutu ISO 9001:2000. **Kedua**, pelaksanaan kegiatan intrakurikuler (teori dan praktik) dan kegiatan ekstrakurikuler mencakup rekoleksi, retreat rohani, olah raga, musik, pecinta alam, dan bela diri. **Ketiga**,

penerapan Kurikulum SMK 2004 diorientasikan pada kebutuhan dunia usaha dan industri. **Keempat**, penerapan indikator mutu berbasis pada kepuasan pelanggan dan standar mutu dan persentase serapan dan evaluasi tiap tahun. Evaluasi pada SMPN 1 Kasihan Bantul melalui pendekatan objektif bertujuan dilakukan oleh Jamaa (2010) untuk mengaudit efektifitas sekolah pada lima komponen manajemen mutu terpadu yaitu pelayanan kepada siswa, lingkungan fisik dan sumber daya, proses, dan produk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar audit yang terstandar dan menemukan adanya perbedaan persepsi diantara subjek yang terlibat, yaitu kelompok pertama (kepala sekolah dan sampel 45 guru) dengan kelompok kedua (observasi peneliti objektif dengan kuantitatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Ria, Santoso, & Muchsin (2014) pada SMK Negeri 1 Surakarta yang telah mengimplementasikan manajemen mutu terpadu berstandar ISO 9001:2008 menunjukkan hasil yang baik karena didukung oleh beberapa faktor yaitu: (1) komitmen warga sekolah yang tinggi; (2) input yang berkualitas baik guru, karyawan maupun peserta didik; dan (3) sarana prasarana yang memadai. Namun demikian, sejumlah kendala juga muncul yaitu: (1) kurangnya motivasi dalam meningkatkan mutu sekolah; (2) kurangnya kefahaman terhadap manajemen mutu terpadu berstandar ISO 9001:2008; (3) kurangnya alokasi dana; dan (4) koordinasi lini kerja yang kurang terkontrol. Upaya yang dilakukan SMK Negeri 1 Surakarta yaitu: (1) menumbuhkan minat kerja guru dan karyawan; (2) mengadakan sosialisasi mengenai manajemen mutu terpadu

berstandar ISO 9001:2008; (3) bekerjasama dengan baik antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah; dan (4) menjalin komunikasi yang baik antar lini kerja. Penelitian Mardiyati & Prabowo (2014) melibatkan 33 sekolah negeri dan swasta untuk menganalisa hasil manajemen mutu terpadu dalam pendidikan di SMK di Kabupaten Karanganyar. Hasilnya menyatakan bahwa adanya interaksi antara manajemen mutu terpadu dengan sistem penghargaan, dan adanya interaksi antara manajemen mutu terpadu dengan komitmen organisasi yang secara signifikan berdampak pada performa manajerial.

Manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan Islam dirasa perlu untuk pengembangan kurikulum oleh Pettalongi (2010) karena beberapa hal, yaitu: masih banyaknya permasalahan kurikulum dalam pendidikan Islam, dapat dijadikan acuan bagi semua tingkatan satuan pendidikan (dasar, menengah, dan pendidikan tinggi), dan masih banyak permasalahan pada sistem yang berjalan belum optimal. Selain itu, adanya permasalahan pada pendidikan madrasah yang secara otonomi harus mengelola usahanya sendiri menurut Nawawi (2006) menjadi alasan mengapa lembaga pendidikan islam sebaiknya menjadikan manajemen mutu terpadu menjadi acuan untuk menuju persaingan bebas dalam usaha pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks madrasah juga telah dilakukan sejumlah penelitian, seperti implementasi manajemen mutu terpadu pada kelas internasional dan akselerasi di MTs Pondok Modern Islam (MTs PPMI) Assalaam Surakarta oleh Jasuri (2014).

Keunggulan manajemen mutu ini terletak pada sistem perencanaan yang matang, realistis dan terukur, dan pada tahap pelaksanaan sudah memiliki pola kerja yang

mengacu kepada prosedur-prosedur terbaik yang dipilih, serta evaluasi yang terprogram dan berkesinambungan. Sebagai lembaga pendidikan Islam formal, MTs-PPMI juga telah mendapat nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Hasil temuan dalam penelitian ini, MTs-PPMI Assalam Surakarta telah menerapkan manajemen mutu terpadu dengan baik dan ada sejumlah pengakuan kepuasan pelanggan yang cukup baik pula terutama pengakuan dari siswa, alumni dan orang tua. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah alumni yang terserap di lembaga-lembaga pendidikan lanjutan yang berkualitas. Hasil penelitian Darmadji (2008) menunjukkan bahwa implementasi prinsip manajemen mutu terpadu di MAN Model Yogyakarta tercermin dari proses yang bertahap dan terus menerus dalam peningkatan mutu dengan pemenuhan harapan pelanggan internal maupun eksternal melalui dukungan, partisipasi aktif dan dinamis dari sejumlah pihak. manajemen mutu terpadu juga memberi manfaat bagi MAN Model sebagai institusi dalam perannya sebagai *leader of change*. Kebersamaan dan kerjasama seluruh komponen MAN Model Yogyakarta menjadi prasyarat implementasi manajemen mutu terpadu yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sejumlah hambatan yang ada dapat terpecahkan dengan mengkomunikasikannya dan mempertinggi komitmen semua komponen untuk bersama-sama menuju pada kualitas yang diharapkan. Upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dalam kerangka budaya mutu juga dilakukan dengan metode *Quality Function Deployment*. Penelitian Astuti, Munadi, Andrian, & Muharom (2011) dengan

menggunakan metode pengembangan pendidikan dimana suara wali santri dan manajemen madrasah dapat diintegrasikan sehingga menjadi masukan bagi pengembangan madrasah. Untuk memvalidasi metodologi ini kemudian diaplikasikan ke dua madrasah di Surakarta. Hasilnya, QFD bisa diterapkan di dalam meningkatkan kualitas madrasah. Selain itu, dari penelusuran diketahui bahwa pendidikan agama harus terus diperbaiki dan dikembangkan karena wali murid madrasah mengatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang paling penting dibandingkan ilmu pengetahuan dan kemampuan bersosialisasi. Dari penjelasan di atas, manajemen mutu terpadu telah memiliki akar yang cukup kuat dalam konteks pendidikan di Indonesia. Sejauh ini, manajemen mutu terpadu telah dianggap mampu mencapai tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia dan karenanya banyak digunakan dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan.

ALUMNI YANG DIHARAPKAN

Dekadensi moral sebenarnya terjadi bukan semata pada siswa-siswi sekolah atau remaja seusia mereka seperti dalam bentuk kekerasan di sekolah, geng motor, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan masalah moral lainnya. Dekadensi moral juga terjadi dalam kelompok dewasa dalam masyarakat sebagaimana terlihat dari maraknya kejahatan seperti pencurian dan pembegalan, pembunuhan dan sebagainya yang sifatnya begitu mudah dilihat sampai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih sulit dilihat karena sifatnya yang sistematis dan terselubung. Artinya, dekadensi moral melanda hampir seluruh lapisan masyarakat dan kesemuanya biasanya bermuara pada pendidikan yang

dianggap belum berfungsi secara maksimal. Pendidikan dengan demikian secara umum dianggap sebagai celah munculnya dekadensi moral sekaligus diminta menjadi solusinya. Secara filosofis, manajemen mutu terpadu memang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dalam diri manusia (Wagner, 1997) yang dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia berarti bahwa madrasah yang menerapkannya juga dapat memaksimalkan potensi siswa dan lulusannya. Proses di dalam manajemen mutu terpadu yang menempatkan siswa sebagai konsumen yang kualitasnya harus selalu ditingkatkan menjadi kunci bagaimana madrasah dan manajemen mutu terpadu dapat difungsikan untuk mengatasi masalah dekadensi moral.

Meningkatkan kualitas siswa pada dasarnya merupakan upaya yang bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang diharapkan akan muncul dalam siswa dan juga lulusan yang berkualitas. Dengan mengasumsikan bahwa dekadensi moral adalah masalah utama yang harus diselesaikan, maka kualitas siswa dan lulusan yang akan dicapai adalah siswa yang berakhlak mulia sehingga mampu menghindari beragam godaan yang akan menurunkan derajat kemanusiaan mereka. Dalam konteks kehidupan siswa di Indonesia saat ini, upaya semacam ini relatif sulit dicapai bukan karena target yang terlalu berat, tetapi karena faktor lingkungan yang demikian kuat dalam mengendalikan perilaku siswa sebagai anak didik. Lingkungan dimaksud tidak semata merujuk pada lingkungan dimana siswa tinggal, atau kawan sepermainannya atau lingkungan fisik yang selama ini mudah diawasi. Lingkungan yang juga menjadi perhatian bersama adalah lingkungan yang dibentuk oleh kemajuan teknologi komunikasi dan

informasi yang menjadikan siswa kini hidup di dua dunia sekaligus, yaitu dunia nyata dan dunia maya.

Dalam dataran praktis di madrasah, kebijakan penggunaan internet dan penyaringan kontennya secara teknis dapat dan harus dilakukan untuk menjamin konsumsi konten yang lebih sehat bagi para siswa dan juga guru. Dalam kerangka manajemen mutu terpadu, fungsi pimpinan madrasah dan dewan guru dalam memberikan teladan kepada siswa mengenai akhlak mulia juga terus menerus harus ditingkatkan. Secara teoritik hal ini nampak mudah dilakukan mengingat kapasitas intelektual guru yang saat ini sudah meningkat memungkinkan hal tersebut dilakukan. Pemerintah secara proaktif berusaha meningkatkan kinerja dengan memberikan tunjangan profesi dan sertifikasi. Jika dicermati sejumlah pemberitaan, fenomena guru bercerai terjadi di banyak wilayah seperti Banyumas, Jawa Tengah (Pikiran Rakyat Online, 2011), Maros, Sulawesi Selatan (FajarOnline Sulsel, 2015), Ciamis, Jawa Barat (Hidayatullah. com, 2015), dan Sidoarjo, Jawa Timur (Republika Online, 2015).

Dalam upaya peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi juga tidak sepenuhnya berhasil. Temuan Khodijah (2013) pada guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam di Sumatera Selatan misalnya tidak adanya terdapat perbedaan kinerja guru setelah menerima tunjangan professional dalam aspek rencana pembelajaran, pelaksanaan, dan asesmen baik diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan dan juga antara mereka yang lulus melalui portofolio dan melalui PLPG. Meskipun merupakan studi kasus yang bersifat lokal, namun implikasi sejenis kemungkinan juga dapat

ditemukan di wilayah lain. Artinya bahwa mengharapkan guru akan menjadi teladan bagi upaya membangun siswa berakhlak mulia tidaklah mudah untuk dicapai. Dengan demikian, fungsi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola dengan manajemen mutu terpadu secara lebih komprehensif perlu dimunculkan dengan melibatkan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan ini dapat meliputi stakeholders madrasah seperti orang tua, pamong praja, dan pengambil kebijakan di tingkat wilayah dan pusat.

SIMPULAN

Manajemen mutu terpadu sebagai salah satu model dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing agar kualitas siswa sebagai salah satu bagian pokok pendidikan dapat terus ditingkatkan. Manajemen mutu terpadu sebagai sebuah sistem mutu meniscayakan keterlibatan banyak stakeholders untuk mencapai tujuan dengan semangat kerja yang terus menerus dan meningkatkan peran pimpinan dalam membangun suasana lembaga pendidikan yang memacu kinerja. Karena beragam kelebihannya, manajemen mutu terpadu digunakan oleh banyak sekolah dan juga madrasah di Indonesia dalam rangka mencapai sejumlah target pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dengan kerangka manajemen mutu terpadu dituntut mampu mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang menjadikan siswa sebagai pribadi berakhlak mulia. Sebagai sebuah tujuan yang relatif sulit dicapai, maka pendekatan manajemen mutu terpadu yang digunakan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut hendaknya dipahami sebagai proses yang tidak singkat dan melibatkan banyak pihak dan pada beragam dimensi kehidupan siswa.

Dengan menerapkan manajemen mutu terpadu untuk membangun pribadi berakhlak mulia pada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan, lembaga pendidikan Islam dituntut memahami dan menerapkan budaya mutu serta responsif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2014). Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu). Potensia: *Jurnal Kependidikan Islam*, 13(1), 1-20. Diambil kembali dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/1038/942>
- Astuti, S. P., Munadi, M., Andrian, Y., & Muharom, F. (2011). Strategi Meningkatkan Mutu Madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2. Diambil kembali dari <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/2816/525>
- Darmadji, A. (2008). Implementasi Total Quality Management sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN Model Yogyakarta. *El Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 182-200. Diambil kembali dari <http://journal.uin.ac.id/index.php/JPI/article/view/2770>
- Hastuti, S. (2008, Juli). Total Quality Management untuk Pendidikan Menuju N-Generation. *Potensio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 23-30. Diambil kembali dari <http://118.96.141.93/ejournal/index.php/potensio/article/view/4/4>
- Mardiyati, E., & Prabowo, M. A. (2014). Pengaruh Interaksi antara Total Quality Management dengan Sistem Penghargaan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada SMK di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Paradigma*, 12(2), 1-20.
- Maryamah. (2013, Juni). Total Quality Management (TQM) Dalam Konteks Pendidikan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, XVIII(1), 95-106. Diambil kembali dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/41/36>
- Pettalongi, S. S. (2010, April). Konsep Total Quality Management dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Humafa: Jurnal Studia Islamika*, 7(1), 37-46. Diambil kembali dari <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/107/99>
- Pikiran Rakyat Online. (2011, Desember 13). *Sejak Ada Tunjangan Sertifikasi, Perceraian Guru Meningkat*. Diambil kembali dari Pikiran Rakyat Online: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/12/13/169174/sejak-ada-tunjangan-sertifikasi-perceraian-guru-meningkat>
- Republika Online. (2015, Juni 4). *Pasca Sertifikasi Perceraian Guru Capai 11 Persen*. Diambil kembali dari Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/04/npe9d8-pasca-sertifikasi-perceraian-guru-capai-11-persen>